

STRATEGI ALIANSI *QUADRILATERAL SECURITY DIALOGUE* (QUAD) DALAM MENANGGAPI ESKALASI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN (TAHUN 2020-2024)

Oleh: Nisa Adila

Pembimbing: Hendrini Renolafitri, S.IP., MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Peace Corps merupakan sebuah instrumen Amerika Serikat di Indonesia yang difokuskan pada program pengajaran bahasa Inggris di wilayah pedesaan Indonesia bukan hanya sarana bantuan pendidikan, tetapi juga menjadi alat diplomasi luar negeri Amerika Serikat. Melalui konsep non-militer, Amerika Serikat berupaya membangun citra positif, memperkuat hubungan bilateral dan menyebarkan nilai-nilai di negara mitra seperti Indonesia.

Penelitian ini menganalisis kepentingan Amerika Serikat di Indonesia melalui lembaga Peace Corps tahun 2021. Analisis ini menggunakan metode kualitatif dengan teori *Offensive Realism* oleh John J. Mearsheimer yaitu suatu negara akan terus berupaya untuk meningkatkan kekuatan di kawasan strategis dengan kekuatan militer ataupun non-militer dan penelitian ini juga menggunakan konsep kepentingan nasional dari Donald E. Nuechterlain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat memanfaatkan Peace Corps sebagai instrumen strategis untuk mencapai kepentingannya terutama kepentingan ideologis melalui penyebaran nilai-nilai individualisme dan keterbukaan, serta kepentingan tata dunia melalui penguatan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Peace Corps juga menjadi bagian dari strategi *nation branding* Amerika Serikat di kancah global. Dengan demikian, program Peace Corps bukan sekedar bentuk kerja sama kemanusiaan, melainkan mencerminkan kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat yang diterapkan dalam bentuk pendekatan sosial dan budaya yang bersifat jangka panjang.

Kata Kunci: Peace Corps, Kepentingan Nasional, *Soft Power*, *Offensive Realism*, *Nation Branding*

ABSTRACT

The Peace Corps is a United States instrument in Indonesia that focuses on English language teaching programs in rural areas of Indonesia, not only as a means of educational assistance but also as a tool of US foreign diplomacy. Through the concept of non-military, the United States seeks to build a positive image, strengthen bilateral relations, and spread values in partner countries such as Indonesia.

This study analyzes the interests of the United States in Indonesia through the Peace Corps in 2021. This analysis uses a qualitative method with the Offensive Realism theory by John J. Mearsheimer, namely that a country will continue to strive to increase its power in strategic areas with military or non-military forces. This study also uses the concept of national interest from Donald E. Nuechterlain.

The result of the study show that the United States utilizes the Peace Corps as a strategic instrument to achieve its interests, particularly ideological ones through the dissemination of individualistic and open values, as well as world order interests through strengthening its influence in Southeast Asia. The Peace Corps is also part of the United States' nation-branding strategy on the global stage. Thus, the Peace Corps program is not merely a form of humanitarian cooperation, but rather reflects the United States' foreign policy interests, implemented through a long-term social and cultural approach.

Keywords: Peace Corps, National Interest, Soft Power, offensive Realism, Nation Branding

PENDAHULUAN

Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep dalam mengkaji isu hubungan internasional, baik itu dalam mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisa perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional sering digunakan oleh para analis untuk menjelaskan perilaku luar negeri dari sebuah negara. Analisa dengan menggunakan konsep kepentingan nasional sangat banyak digunakan dalam studi hubungan internasional, Sebagian besar ilmuwan ataupun praktisi hubungan internasional sependapat bahwa alasan utama pembenaran bagi tindakan suatu negara adalah kepentingan nasional.¹

Kepentingan nasional juga mencakup perlindungan terhadap keamanan domestik, kemakmuran ekonomi dan penyebaran nilai-nilai demokrasi global. Namun, pada peristiwa serangan 9/11 (*Nine Eleven*) di New York mengubah secara drastis prioritas kepentingan nasional dari negara Amerika Serikat, terutama dalam bidang keamanan.² Amerika Serikat mengalami sejarah kelam yang berkaitan dengan hubungan antara negara Amerika Serikat dan Umat muslim

pada peristiwa 9/11. Peristiwa yang seharusnya meningkatkan *power* dan simpati global terhadap Amerika Serikat justru menjadi titik balik kemunduran diplomasi dan citra Amerika Serikat di dunia.³

Sebagai sebuah peristiwa yang memiliki dampak global, tragedi 9/11 memiliki pengaruh yang signifikan di negara muslim, khususnya berkaitan dengan isu terorisme di Indonesia. Kerena hal itu, Indonesia juga terkena dampak dari peristiwa tersebut, terlebih lagi negara Indonesia menjadi negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia dengan persentase 87,2% dari total populasi Indonesia atau mencapai 229,62 juta jiwa.⁴ Sebelumnya terorisme hanya sebuah isu lokal di daerah tertentu seperti daerah-daerah yang terjadi konflik. Namun, ternyata setelah peristiwa 9/11 tahun 2001 isu tersebut menjadi isu global dan mulai tersebar ke seluruh negara, terutama negara-negara muslim dan salah satunya Indonesia.⁵

Keadaan negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia yang masih terus berkembang memicu perhatian negara-

¹ Mohtar Mas'ood, *Imu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1990, Hlm 139

² Dewi Triwahyuni. *Perubahan Kebijakan keamanan Amerika Serikat Pasca 11 September 2001 untuk Kawasan Asia Tenggara* diakses Pada 19 November 2024 dari <https://repository.unikom.ac.id/30659/1/bu-dewi-triwahyuni.pdf>

³ O'Rourke, R., *U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress*. Congressional Research Service, 4, 2021

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia, Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar*, 2020, Diakses Pada 17 November 2024 dari <https://kemenag.go.id>

⁵ Awani Irewati., et.al, *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menyikapi Masalah Terorisme Pasca 9/11*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik, 2005, Hlm 47

negara besar untuk membantu dalam bidang ekonomi, militer, maupun sosial. Negara berkembang memerlukan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya termasuk negara Indonesia. Meskipun Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif, tetapi permintaan bantuan terhadap Uni Soviet maupun Amerika Serikat tetap berjalan.⁶ Salah satu cara untuk menyalurkan bantuan tersebut yaitu melalui sebuah lembaga pemerintahan Amerika Serikat yang disebut Peace Corps. Volunteer Peace Corps telah tersebar hingga ke seluruh dunia dengan mengemban misi perdamaian, memperbaiki kondisi kesehatan, memajukan pendidikan, mengembangkan teknologi informasi serta menjaga kelangsungan lingkungan sekitar.⁷

Lembaga Peace Corps merupakan sebuah badan bantuan Amerika Serikat untuk negara-negara dunia ketiga dalam bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, bantuan teknis, dan segala yang berkaitan dengan pembangunan komunitas masyarakat kecil.⁸ Sejak Peace Corps didirikan hingga saat ini telah melakukan pengabdian lebih dari 142 negara di seluruh dunia dengan jumlah volunteer lebih dari 240.000 volunteer yang telah tersebar di 140 negara mitra kerja sama dengan Amerika Serikat dengan membawa misi perdamaian, serta memperbaiki kondisi kesehatan, memajukan Pendidikan, mengembangkan teknologi informasi dan menjaga lingkungan sekitar. Fokus utama Peace Corps di Indonesia yaitu pada bidang Pendidikan terutama dalam

mengajar Bahasa Inggris sebagai bahasa asing di sekolah-sekolah pedesaan dan madrasah. Volunteer Peace Corps bekerja di madrasah dan sekolah negeri, terutama di wilayah pedesaan untuk mendukung pengajaran bahasa Inggris. Selain itu mereka juga memberikan pelatihan kepada guru lokal agar dapat mengaplikasikan metode pengajaran yang lebih efektif.⁹

Setelah program Peace Corps kembali dijalankan di Indonesia pasca terhenti lebih dari 40 tahun, Peace Corps kembali mengalami tantangan besar pada tahun 2020 saat dunia dilanda pandemi covid-19. Pertama kalinya dalam sejarah, Peace Corps menarik seluruh volunteernya dari negara mitra secara bersamaan termasuk negara Indonesia sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para volunteer. Keputusan ini memberikan jeda yang signifikan dalam kegiatan diplomasi sosial Amerika Serikat termasuk misinya di Indonesia. Meski demikian, Peace Corps terus melakukan koordinasi dan persiapan melalui diskusi intensif dengan mitra pemerintahan seperti BAPPENAS dan kementerian-kementerian di Indonesia yang berkaitan. Upaya ini menunjukkan bahwa keberadaan Peace Corps tetap menjadi bagian dari diplomasi Amerika Serikat ditengah krisis global. Ketika kondisi dunia mulai membaik, kesepakatan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia diperbaharui melalui penandatanganan pembaharuan MoU tentang Peace Corps.¹⁰

Pada tahun 2021 bertepatan dengan pembaharuan kesepakatan bilateral dengan Indonesia yang menjadi landasan hukum untuk program Peace Corps, tanggal 14 Desember 2021 Menteri Luar Negeri

⁶ Franklin B. Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*, New York: Cornell University Press, 1976, Hlm 165

⁷ Peace Corps diakses pada 04 November 2024 dari <https://www.peacecorps.gov>

⁸ Peace Corps Indonesia diakses Pada 06 November dari <http://www.peacecorps.gov/index.cfm?shell=about> 2024

⁹ Peace Corps Indonesia, Annual Report: Laporan Tahunan 2020

¹⁰ Peace Corps Indonesia diakses pada 05 November 2024 dari <https://www.peacecorps.gov>

Amerika Serikat Anthony J. Blinken dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang direvisi di Jakarta untuk memperbaharui perjanjian yang ditandatangani sebelumnya untuk membuka Kembali program Peace Corps.¹¹ MoU Peace Corps Indonesia tahun 2021 berisi kesepakatan Amerika Serikat dan Indonesia yang mengatur tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat terhadap volunteer Peace Corps dan tanggung jawab Indonesia sebagai negara tempat mengabdikan para volunteer. Selain itu dalam kesepakatan ini juga diatur mekanisme, kode etik serta penggunaan dana oleh lembaga Peace Corps selama mereka melaksanakan pengabdian di negara mitra yaitu Indonesia. Kesepakatan terbaru program Peace Corps juga bertujuan untuk mengirimkan volunteer Amerika untuk mengajar bahasa Inggris di madrasah dan sekolah yang ada di Indonesia.¹²

Sebagian negara salah satunya Amerika Serikat telah menjadikan kebiasaan atau identitasnya sebagai alat politik untuk mempengaruhi negara lain melalui daya Tariknya. Hal itu ditujukan agar kepentingannya terutama dalam hal penyebaran citra negara dan disebarkan secara luas yang sering kali tidak dirasakan oleh pihak lain. Upaya tersebut dilakukan tidak lepas dari adanya pemikiran bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses informasi secara terbuka, dan setiap aktor memiliki kesempatan untuk dapat mengenalkan kebiasaan negaranya agar dapat dikenali oleh masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih detail kepentingan Amerika Serikat di

Indonesia melalui kerja sama lembaga Peace Corps pada Tahun 2021.

KERANGKA TEORI

Teori: *Realisme Offensive*

Dalam studi hubungan internasional, realisme memandang bahwa sistem internasional bersifat anarkis dan negara merupakan aktor utama yang rasional. John Mearsheimer kemudian mengembangkan teori *offensive realism* yang menjelaskan bahwa negara-negara besar tidak akan pernah puas hanya dengan bertahan hidup, tetapi selalu berusaha memaksimalkan kekuasaan mereka mencapai kepentingannya dan mendominasi di wilayah strategis.¹³ Berdasarkan pandangan Mearsheimer, tujuan akhir dari negara besar adalah menjadi hegemoni regional karena hanya dengan cara tersebut negara dapat menjamin keamanan dan kepentingan nasionalnya.

Teori *offensive realism* ini menegaskan bahwa dalam kondisi anarki internasional, negara besar akan cenderung ofensif. Negara akan menggunakan berbagai instrument, baik itu militer ataupun non-militer, untuk memperluas pengaruh dan mengurangi potensi ancaman dari kekuatan lain.¹⁴ Hal ini dapat dilihat dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memanfaatkan instrumen non-militer seperti diplomasi, bantuan ekonomi dan program-program sosial-budaya.

Berdasarkan konteks pembahasan dalam penelitian ini, teori dari Mearsheimer digunakan untuk menjelaskan kepentingan Amerika Serikat untuk mengaktifkan kembali program Peace Corps di Indonesia tahun 2021. Program Peace Corps ini tidak

¹¹ Peace Corps Indonesia, Annual Report: Laporan Tahunan 2021. Surabaya: Peace Corps Indonesia, diakses pada 12 November 2025 dari <https://www.peacecorps.gov>

¹² *Memorandum of Understanding Peace Corps* Indonesia tahun 2021

¹³ John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics* (New York: W.W.Norton Company & Company, 2001), hlm 21-22

¹⁴ *Ibid*

dapat dipandang hanya sebagai kerja sama dalam bidang pendidikan, tetapi juga sebagai strategi ofensif non-militer untuk memperkuat pengaruh ideologis Amerika Serikat di negara-negara mitra Peace Corps, membangun citra positif di negara-negara berkembang, serta mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi radikalisme yang dianggap dapat mengancam kepentingan globalnya. Selain itu program Peace corps juga menjadi sarana bagi Amerika Serikat untuk menanggapi pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat. Dengan artian, bahwa Peace Corps merupakan instrumen hegemoni yang digunakan oleh negara Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi dan memastikan stabilitas di Kawasan Asia Tenggara tetap berjalan selaras dengan kepentingan nasionalnya.

Konsep: Kepentingan Nasional

Suatu kepentingan berawal dari munculnya kebutuhan suatu negara, yang dapat dilihat dari keadaan internalnya baik itu dalam aspek politik, ekonomi ataupun sosial budaya. Kepentingan nasional juga didasari oleh kekuatan atau *power* yang ingin diciptakan oleh suatu negara dan memberikan dampak bagi perkembangan negara tersebut agar memperoleh pengakuan dari negara-negara di seluruh dunia. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai politik luar negeri suatu negara.¹⁵

Kepentingan nasional dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Donald E. Nuechterlain, yang mengemukakan kepentingan nasional sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan

eksternal.¹⁶ Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlain dibagi menjadi empat dasar yang dikenal sebagai kepentingan dasar negara (*Basic Interest*), antara lain:

1. *Defence of Homeland* (Kepentingan keamanan), yaitu perlindungan terhadap negara-bangsa serta warga negara dari ancaman kekerasan fisik negara lain dan hal lain yang mengancam sistem politik nasional.
2. *Economic Well-being* (Kepentingan ekonomi), yaitu adanya tambahan nilai ekonomi dalam hubungan dengan negara lain dimana hubungan perdagangan akan mendapatkan keuntungan.
3. *Favorable World Order* (Kepentingan tata dunia), yaitu adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan aman sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi diluar batas negara dengan aman.
4. *Promotion of Values* (Kepentingan ideologi), yaitu perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai yang dapat dipercaya masyarakat dari suatu negara.¹⁷

Konsep kepentingan nasional (*National Interest*) dalam hubungan internasional juga sering diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam berbagai bidang. Tujuan tersebut yang akan menjadi acuan bagi negara dalam berinteraksi dengan aktor lainnya.¹⁸ Amerika Serikat sebagai aktor global menggunakan konsep tersebut untuk

¹⁶ Donald E. Nuechterlain, *National Interest: A New Approach*, Orbis, Vol.23. No.1 (Spring), 1979, Hlm 57

¹⁷ Ibid

¹⁸ Khasan Ashari, "Kamus Hubungan Internasional". Bandung: Nuansa Cendekia, 2015, Hlm 308

¹⁵ P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, Hlm 21

memperluas pengaruhnya secara perlahan, termasuk melalui program Peace Corps. Salah satu cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya adalah dengan membangun citra positif dimata dunia melalui strategi *nation branding*, yaitu menciptakan pandangan atau kesan sebagai negara yang turut berkontribusi, terbuka dan melakukan perubahan yang positif di tingkat internasional. Hal ini sejalan dengan pendekatan diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat melalui instrumen Peace Corps.

Level Analisis: Kelompok Negara

Dalam mengkaji sebuah isu internasional akan dibutuhkan analisis mendalam atau disebut sebagai level analisis. Dalam hal ini level analisis adalah gabungan pemikiran yang menyatukan aktor-aktor dalam hubungan internasional dan aktor-aktor tersebut beproses dan saling berinteraskti dalam hubungan internasional. Ada lima level analisis yaitu individu, kelompok, negara bangsa, kelompok negara-negara dan sistem internasional. Level analisis negara bangsa yang beranggapan bahwa semua pembuat Keputusan pada dasarnya berperilaku sama ketika mereka ada di situasi yang sama. Perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga dan perpolitikan hanya akan diperhatikan sejauh perilaku mereka berkaitan dengan tindakan internasional negara yang berkaitan.¹⁹

Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara bangsa. Hal ini karena beberapa kebijakan yang dibuat dalam pembentukan program Peace Corps yang akan dijalankan oleh berbagai pihak baik itu individu, kelompok, organisasi, lembaga dan program tersebut bertujuan sebagai perantara hubungan kerja

sama Amerika Serikat dengan negara Indonesia. Dengan artian bahwa lembaga Peace Corps digunakan sebagai instrumen strategi oleh Amerika Serikat dengan negara lain salah satunya adalah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada penggunaan kata-kata dan bersifat deskriptif dalam mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan. Metode ini digunakan untuk memahami sebuah fenomena tentang tingkah laku, motivasi dan tujuan secara utuh yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini fokus pada pemahaman terhadap kepentingan Amerika Serikat di Indonesia melalui kerja sama lembaga Peace Corps yang digunakan sebagai sebuah instrument strategi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dan studi literatur. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara bersama beberapa pihak yang berkaitan dan melalui sumber dari buku, dokumen, laporan, jurnal, surat kabar, artikel, dan internet yang relevan dan menyajikan informasi mengenai Peace Corps sebagai instrumen strategi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kerja Sama Amerika Serikat dan Indonesia

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia bermula sejak masa sebelum kmerdekaan indonesia dan secara resmi terjalin melalui pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia pada tahun 1949 dan kedutaan besar Indonesia di

¹⁹ Mochtar mas' oed, lmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi ,1990, Hlm 41

Amerika Serikat pada tahun 1950.²⁰ Sejak saat itu, hubungan kedua negara berkembang dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosialnudaya dan pendidikan yang didasarkan pada kepentingan bersama dan pengakuan atas kedaulatan masing-masing negara. Indonesia sebagai sebuah negara dengan posisi strategis di Asia Tenggara dan populasi penduduk mayoritas muslim menjadi salah satu mitra penting bagi Amerika Serikat dalam konteks geopolitik regional dan global.

Periode perang dingin membawa dinamika yang sangat kompleks dalam hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas-aktif yang berusaha untuk menghindari keterlibatan dalam blok manapun, sementara itu Amerika Serikat berupaya untuk membendung pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara. Hubungan kedua negara ini sempat mengalami ketegangan saat kepemimpinan presiden Soekarno yang arahnya condong pada blok Timur, namun setelah pergantian rezim ke pemerintahan orde baru yang lebih condong ke barat, membuat hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat lebih kuat melalui bantuan ekonomi dan militer. Amerika Serikat juga dianggap memberikan dukungan rahasia kepada militer Indonesia dalam isu pemberantasan komunisme pasca peristiwa G30S PKI.

Setelah berakhirnya perang dingin, fokus hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat bergeser ke isu demokrasi, hak asasi manusia dan kerja sama keamanan. Amerika Serikat mulai menekan Indonesia terkait catatan HAM dan demokrasi, terutama terkait kasus Timor

Timur, akan tetapi tetap memberikan dukungan dalam peningkatan tata Kelola pemerintahan dan reformasi sektor keamanan. Reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998 memperkuat hubungan bilateral yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan penghormatan HAM, meskipun terdapat pertentangan terkait perbedaan pandangan dalam isu-isu tersebut.

Kemudian peristiwa 9/11 pada tahun 2001 menjadi titik balik hubungan bilateral dengan meningkatnya fokus Amerika Serikat pada perang melawan terorisme global. Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis dan mempunyai pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara, menjadi mitra strategis Amerika Serikat dalam penanggulangan terorisme, terutama dalam menghadapi jaringan teroris seperti Jemaah Islamiyah. Kerja sama keamanan pun berkembang melalui pembentukan unit-unit terror densus 88, pertukaran intelijen, serta bantuan teknis dan pendanaan bagi program kontra-terorisme di Indonesia.²¹

Kerja sama yang lebih luas antara kedua negara muncul pada dekade 2010an dengan memperkuat dan memperdalam kolaborasi di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, teknologi dan lingkungan hidup. Hubungan kedua negara ini semakin menguat dengan ditingkatkannya status kemitraan strategis komprehensif.²² Indonesia dipandang sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan mitra penting dalam menjaga stabilitas kawasan indo-pasifik, sedangkan

²¹ Yulian Tri Saptono dkk, "Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Mendukung Peran Indonesia sebagai Leading Sector dalam Pembentukan ASEAN Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No.1, 2023, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/File/1116/608>

²² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Sejarah Hubungan Republik Indonesia dan Amerika Serikat*

²⁰ Kementerian Luar negeri Republik Indonesia, *Sejarah Hubungan Republik Indonesia dan Amerika Serikat* pada 12 Mei 2025 diakses dari <https://kemlu.go.id>

Amerika Serikat menjadi mitra utama Indonesia dalam investasi, teknologi dan modernisasi pertahanan.

Dalam kerangka hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia, sebuah lembaga Amerika Serikat yaitu Peace Corps muncul sebagai instrumen penting diplomasi dalam bidang pendidikan di berbagai negara berkembang terutama negara Indonesia.²³ lembaga Peace Corps memiliki program yang berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat lokal, khususnya melalui pengajaran bahasa Inggris di wilayah pedesaan dan berperan sebagai strategi non-militer untuk membangun citra positif masyarakat internasional terhadap Amerika Serikat. Program ini bukan sekedar kerja sama pendidikan dan sosial, tetapi merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruh ideologis dan mempertahankan dominasi di kawasan Asia Tenggara.

Sejarah dan awal mula Peace Corps di Indonesia

Peace Corps adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Amerika Serikat pada masa kepemimpinan John F Kennedy dengan tujuan utama membantu negara-negara berkembang melalui bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan komunitas. Lembaga ini resmi berdiri pada 1 Maret 1961 berdasarkan perintah eksekutif No 10924.²⁴ Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima manfaat dan dukungan dari program Peace Corps. Kehadiran Peace Corps di Indonesia mulai

pada tahun 1963 setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Sebagai tindak lanjut, Indonesia menerima 17 volunteer Peace Corps yang ditugaskan untuk mengajar pendidikan jasmani dan olahraga. Penempatan awal ini sangat strategis karena bertepatan dengan persiapan Indonesia dalam menghadapi olimpiade Tokyo tahun 1964, sehingga kehadiran volunteer dapat membantu peningkatan kemampuan atlet Indonesia.²⁵

Program Peace Corps berkembang dengan baik pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 1964, Peace Corps mengirimkan tambahan volunteer 14 orang dan diikuti 15 orang setelahnya, sehingga dalam waktu yang singkat volunteer Peace Corps sudah tersebar di 18 provinsi dan 20 kota di Indonesia.²⁶ Pada masa awal masuknya Peace Corps ke Indonesia, lembaga ini tidak bertahan lama karena dinamika politik domestik Indonesia saat itu. Peristiwa G30S PKI pasca tahun 1965 yang menimbulkan gejolak politik dan perubahan rezim, situasi keamanan Indonesia dinilai tidak kondusif bagi para volunteer. Ketidakpastian politik dan meningkatnya sensitivitas terhadap kehadiran pihak luar menyebabkan pemerintah Amerika Serikat menghentikan sementara program Peace Corps di Indonesia. Keputusan tersebut, mencerminkan bagaimana faktor politik domestik dapat mempengaruhi kelangsungan kerja sama internasional.

Setelah pernah terhenti dari tahun 1965, Peace Corps akhirnya kembali beroperasi di Indonesia tahun 2009. Pengambilan kebijakan ini, berdasarkan beberapa kali pengamatan yang telah

²³ Peace Corps Indonesia, 2023 diakses pada 21 Juni 2025 dari <https://www.peacecorps.gov/indonesia/>

²⁴ U.S. Department of State, *Foreign Relations of the United States 1961-1963*, United States diakses pada 20 Juni 2025 dari <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v25/d70>

²⁵ Peace Corps, *History, core Expectations, project framework, intro to PST*, Peace Corps Indonesia, 2018

²⁶ Ibid

dilakukan sebelumnya oleh tim evaluasi Peace Corps, sehingga setelah melihat situasi yang cukup aman dan melihat respon dari media serta masyarakat yang cukup baik, pihak Peace Corps kembali beroperasi dengan melanjutkan program sebelumnya dan terus mengembangkan sesuai dengan kebutuhan serta menyesuaikan dengan perkembangan global.

Dalam periode baru tahun 2009, Peace Corps Indonesia berfokus pada pengajaran bahasa Inggris di berbagai sekolah menengah pertama dan madrasah. Para volunteer ditempatkan di daerah pedesaan yang cukup jauh dari pusat kota agar dapat membantu pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Selain itu, volunteer juga bekerja sama dengan guru-guru disekolah mitranya untuk mengolaborasikan metode pengajaran yang dibawa oleh para volunteer dan sistem di sekolah, sehingga keberadaan Peace Corps tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di sekolah mitra Peace Corps.²⁷ Program ini menegaskan bahwa Peace Corps berfungsi ganda sebagai mitra Pembangunan dan instrumen diplomasi.

Setelah berjalan beberapa tahun, pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia. Untuk menjaga keselamatan dan keamanan volunteer, Peace Corps mengambil keputusan dengan menarik seluruh volunteer dari negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Keputusan menghentikan sementara kegiatan tersebut berjalan selama masa pandemi dan kembali setelah keadaan membaik. Meskipun, kegiatan secara langsung terhenti, koordinasi dengan pemerintah Indonesia tetap dilakukan. Peace Corps menjalin komunikasi dengan

kementerian luar negeri dan yang terkait untuk mempersiapkan kelanjutan program ketika situasi sudah kembali stabil.²⁸

Pada tahun 2021, Peace Corps Indonesia kembali melakukan pembaharuan terkait perjanjian program Peace Corps antara Amerika Serikat dan Indonesia. pada 14 Desember 2021, menteri luar negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi dan menteri luar negeri Amerika Serikat yaitu Anthony J Blinken menandatangani MoU terbaru di Jakarta. Perjanjian ini memperbaharui MoU sebelumnya pada tahun 2009 dan memuat ketentuan mengenai tanggung jawab kedua belah pihak termasuk perlindungan terhadap volunteer, kode etik, serta pengaturan pendanaan.²⁹

Selain memberikan dukungan dalam bidang pendidikan, Peace Corps juga berperan dalam memperkuat interaksi sosial budaya antara warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat yang diwakili oleh para volunteer. Para volunteer tinggal bersama keluarga angkat mereka di Indonesia tepatnya di daerah tempat mereka mengabdikan, sehingga terjadi pertukaran budaya yang cukup intensif. Kehidupan sehari-hari volunteer bersama masyarakat lokal memperkuat pemahaman lintas budaya dan menciptakan hubungan emosional jangka panjang antara kedua bangsa. Aspek ini menjadi salah satu kekuatan utama Peace Corps sebagai instrumen non-militer yang tidak dimiliki dalam bentuk kerja sama lainnya.

Peace Corps dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

²⁸ Peace Corps, *Execution of Volunteers Worldwide*, 2020, diakses Pada 12 Mei 2025 dari <https://www.peacecorps.gov/news/library/peace-corps-evacuates-volunteers/>

²⁹ *Memorandum of Understanding Peace Corps Indonesia tahun 2009*

²⁷ Peace Corps, *History, core Expectations, project framework, intro to PST*, Peace Corps Indonesia

Berdasarkan persepektif *realism offensive* yang dikemukakan oleh Mearsheimer, bahwa negara-negara besar akan selalu berupaya untuk memaksimalkan kekuatan dan pengaruhnya di tengah sistem internasional yang anarkis.³⁰ Peace Corps muncul sebagai strategi non-militer Amerika Serikat untuk menanamkan nilai-nilai dan memperluas pengaruh di negara-negara mitra terutama Indonesia. Program ini tidak hanya sebagai sebuah diplomasi sosial, tetapi bagian dari usaha untuk menciptakan ketergantungan dalam jangka panjang yang memperkuat kedudukan Amerika Serikat dalam membendung persiangan global.

Pada masa pemerintahan John F Kennedy, Peace Corps dibentuk awal mulanya sebagai bagian dari strategi global untuk mengimbangi pengaruh Uni Soviet di negara-negara yang berkembang saat perang dingin. Kennedy menganggap bahwa kekuatan militer saja tidak akan cukup, sehingga pendekatan humanis melalui pendidikan dan hubungan sosial dianggap lebih efektif untuk membangun pengaruh jangka panjang. Program Peace Corps, menghadapi tantangan seperti kritik dari kalangan konservatif di Amerika Serikat yang memandangnya terlalu idealis, serta situasi politik yang tidak stabil pada masa tersebut, termasuk Indonesia pada pertengahan 1960 an. Situasi ini memaksa Amerika Serikat menghentikan sementara kegiatan Peace Corps demi keamanan dan keselamatan warga negaranya yang sedang mengabdikan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kerangka *realism offensive*, Amerika Serikat hanya menjalankan program ini Ketika situasi politik memungkinkan keuntungan strategis.

Program ini kemudian diaktifkan kembali tahun 2009 pada masa

kepemimpinan Barack Obama. Pada masa pemerintahan Obama, kebijakan *pivot to Asia* menempatkan Indonesia sebagai kawasan strategis penting. Peace Corps menjadi salah satu instrumen untuk memperluas pengaruh Amerika Serikat secara sistematis, terutama untuk menekan pengaruh dari saingan seperti Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Presiden Obama mendukung program penguatan Peace Corps dengan menambah anggaran dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan komitmen Amerika Serikat.³¹

Setelah sempat terhenti lebih kurang 40 tahun pasca ketidakstabilan politik di Indonesia, Peace Corps resmi beroperasi kembali di Indonesia tahun 2009 dengan fokus pada program pengajaran bahasa Inggris dan pengembangan masyarakat. Pada masa pemerintahan Obama program ini berhasil mendukung atau melatih ribuan guru lokal dan memperluas mitra negaranya hingga ke 141 negara mitra Peace Corps.³² Meskipun menghadapi tantangan budaya dan adaptasi, Peace Corps terus berkembang dan menjadi bagian penting dari hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia.

Kemudian pada masa pemerintahan Donald Trump, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mengutamakan doktrin *America First* yaitu menekankan keamanan dan prioritas domestik. Pada pemerintahan Trump, Lembaga Peace Corps mengalami pemotongan anggaran.³³ Meskipun demikian, Peace Corps tetap dipertahankan karena dianggap penting dalam menjaga pengaruh sosial dan budaya

³⁰ John J. Mearsheimer, *Tragedi Politik Kekuatan Besar* (New York: WW Norton, 2001), hlm. 21–22.

³¹ Peace Corps Indonesia, *History Peace Corps Indonesia* diakses pada 08 Mei 2025 dari <https://www.peacecorps.gov>

³² Peace Corps, *Annual Performance Report*, 2016 diakses pada 15 Mei 2025 dari <https://www.peacecorps.gov>

³³ Peace Corps Indonesia, *Annual Report Tahun 2022*, Washington D.C.: Peace Corps, 2022

di negara mitra termasuk Indonesia. Program ini berjalan hingga tahun 2020, saat pandemi covid-19 memaksa para volunteer untuk kembali ke negara asalnya demi menjaga keselamatan dan kesehatan saat itu. Meskipun pandemi, Amerika Serikat terus menyiapkan pengoperasian Peace Corps dengan penyesuaian situasi global yaitu menggunakan sistem hybrid (gabungan sistem online dan offline) pada tahun 2021.³⁴ Penandatanganan ulang MoU oleh menteri luar negeri Indonesia dan menteri Luar negeri Amerika Serikat menggambarkan komitmen kedua negara dalam menjaga dan memperkuat hubungan melalui Peace Corps. Program ini bukan hanya diplomasi sosial tetapi merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk memperkuat hegemoninya di kawasan Asia Tenggara serta menekan pengaruh lain.

Kepentingan negara Amerika Serikat di negara Indonesia

Peace Corps Indonesia tidak hanya sekedar program kemanusiaan atau diplomasi sosial, melainkan strategi jangka panjang untuk terus menyebarkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara dan melalui lembaga Peace Corps negara Amerika Serikat berupaya menanamkan nilai-nilai keterbukaan, menekan paham radikalisme, memperkuat dalam bidang sosial dan politik dan menciptakan ketergantungan budaya yang mendukung kedudukannya sebagai hegemoni global. Berdasarkan konsep dari Nuechterlain, kepentingan nasional dapat diklasifikasikan kedalam empat kategori yaitu kepentingan pertahanan, ekonomi, tata dunia, dan ideologi.³⁵ berdasarkan konteks Peace Corps, program ini menggambarkan dua

kepentingan yaitu ideologis dan tata dunia dalam jangka waktu Panjang.

1. Kepentingan Ideologis (*Promotion of Value*)

Sejak berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya yang memimpin tatanan internasional pada masa itu.³⁶ Hilangnya ideologi utama membuat liberalisme demokratis menjadi ideologi dominan. Akan tetapi, dalam kerangka *offensive realism*, situasi seperti ini tidak akan menghentikan negara Amerika Serikat untuk menghentikan perluasan pengaruhnya ke berbagai kawasan strategis. Justru tanpa pesaing utama, negara Amerika Serikat semakin agresif untuk terus mendorong penyebaran nilai-nilai liberal ke seluruh dunia sebagai upaya untuk mempertahankan hegemoninya.³⁷ Amerika Serikat menyebarkan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, partisipasi aktif dan etos kerja yang mencerminkan ideologi liberalisme demokratis. Sejalan dengan teori dari Mearsheimer bahwa negara besar akan memanfaatkan segala instrumen yang dimilikinya untuk menjaga superioritas dan mencegah munculnya potensi kekuatan pesaing.

Kemudian peristiwa 11 september 2001 atau disebut peristiwa 9/11 mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara drastis. Serangan terorisme di pusat kekuasaan Amerika Serikat menyatakan bahwa ancaman pasca perang dingin bukan lagi komunisme, melainkan radikalisme transnasional.³⁸ Respon langsung Amerika Serikat adalah melancarkan kebijakan *war*

³⁴ Peace Corps Indonesia, Annual Report: Laporan Tahunan 2021

³⁵ Donald E. Nuechterlain, *National Interest: A New Approach*. Orbis, Vol.23. No.1 (Spring)

³⁶ Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: Free Press, 1992), hlm. 45–47

³⁷ John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York: W.W Norton dan Company, 2001), hlm 139-145

³⁸ Bruce Hoffman, *Inside Terrorism* (New York: Columbia University Press, 2006), hlm. 282–285

on terror melalui hard power yaitu melalui invasi ke Afghanistan 2001 dan ke Irak 2003, akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan dalam menciptakan stabilitas kawasan dan menyebabkan Amerika Serikat menyadari bahwa sangat diperlukan strategi *soft power* untuk melawan isu radikal tersebut.³⁹

Setelah peristiwa 9/11, ancaman radikalisme transnasional menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Serangan tersebut menggambarkan bahwa ancaman pasca perang dingin bukan lagi komunisme tetapi radikalisme yang bersifat lintas negara. Isu radikalisme menjadi sangat relevan karena negara Indonesia sebagai negara yang juga pernah mengalami tragedi aksi terorisme seperti bom bali 2002 yang dilakukan jaringan jamaah Islamiyah. Pemerintah Amerika Serikat melihat bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas regional sekaligus dalam membentuk pandangan dunia islam terhadap barat.⁴⁰ Oleh karena itu, penyebaran nilai-nilai demokratis dan moderasi agama melalui pendekatan pendidikan dianggap sebagai strategi jangka Panjang untuk mengurangi potensi radikalisme.

Melalui pembahasan Peace Corps, lembaga ini memiliki relevansi penting di negara Indonesia. Sebagai negara dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia dan juga mayoritas penduduknya adalah muslim, Indonesia memandang strategi baik dari sisi geopolitik maupun ideologi. Dengan upaya menempatkan para volunteer Peace Corps di sekolah-sekolah negeri ataupun berbasis Islami di Indonesia, Amerika Serikat berupaya membangun imunitas ideologi

terhadap radikalisme melalui pendekatan sosial dan pendidikan.⁴¹

Penyebaran ideologi melalui Peace Corps dilakukan secara perlahan, sistematis, dan melalui jalur non konfrontatif. Sekolah menjadi salah satu sarana yang strategis karena merupakan tempat terbentuknya pola pikir generasai muda dan akan menjadi penentu masa depan. Melalui upaya menanamkan nilai-nilai keterbukaan, berpikir kritis dan keberaniannya menyatakan dari dasar, Amerika Serikat secara tidak langsung membentuk masyarakat dengan pola yang lebih reseptif terhadap ideologi liberal.⁴² Pemilihan sekolah mitra sebagai program dasar menunjukkan komunitas luas, sedangkan penempatan para volunteer di sekolah-sekolah islam menggambarkan strategi khusus untuk menjangkau komunitas muslim yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia.⁴³ Dengan upaya ini, Amerika Serikat memiliki harapan dapat mendorong moderasi beragama, mengurangi potensi radikalisme, dan menciptakan generasi muda muslim yang lebih terbuka terhadap nilai demokrasi dan kerja sama internasional.

Selama menjalankan hubungan luar negerinya, suatu negara tidak hanya mengejar kepentingan politik atau ekonomi semata, tetapi juga membawa serta nilai-nilai yang dianut oleh negaranya. Menggunakan sudut pandang *offensive realism*, dapat dipahami bahwa kepentingan ideologi Amerika Serikat melalui Peace Corps bukan merupakan tujuan idealis, melainkan instrumen untuk memperkuat hegemoni di kawasan. Secara ideologis, Peace Corps membawa nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Amerika Serikat

³⁹ Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, hlm. 31–33

⁴⁰ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm. 12–14.

⁴¹ Peace Corps Indonesia, *Annual Report 2021*

⁴² Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* hlm. 180–183.

⁴³ Peace Corps Indonesia, *Annual Report 2021*

seperti demokrasi, partisipasi aktif, keterbukaan, kemampuan bahasa Inggris, dan lainnya. Secara teoritis, hal ini dapat dipahami sebagai alat hegemoni kultural untuk memasukkan potensi resistensi domestik di negara-negara mitranya.

Selain menjalankan misi pendidikan dan pengembangan masyarakat, Peace Corps secara tidak langsung membawa misi ideologis Amerika Serikat ke negara-negara mitranya. Meskipun tidak disampaikan secara langsung dalam bentuk pandangan politik. Upaya ini terlihat sederhana, tetapi jika dipahami kembali dari perspektif Mearsheimer pembentukan pola pikir kritis dan partisipatif ini adalah cara Amerika Serikat mengubah kultur masyarakat agar lebih reseptif terhadap nilai liberal demokrasi Amerika. Dengan demikian, penguatan ideologi berfungsi untuk mewujudkan lingkungan sosial yang lebih mendasar bagi dominasi Amerika Serikat. Peace Corps menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya tatanan sosial dan politik yang lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat.

Peace Corps tidak hanya ditujukan untuk di Indonesia, tetapi juga bagian dari usaha Amerika Serikat dalam mempertahankan dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Kawasan yang cukup strategis sebagai jalur perdagangan, pusat populasi muslim dunia, dan kawasan persaingan dengan kekuatan lain seperti Tiongkok. Melalui Peace Corps juga Amerika Serikat berupaya membangun citra positif, memperkuat hubungan *people to people diplomacy*⁴⁴ dan menanamkan nilai-nilai liberal secara perlahan agar pengaruhnya semakin mengakar di kawasan ini.

⁴⁴ Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, hlm. 53-55

2. Kepentingan Tata Dunia (*Favorable World Order*)

Konsep tatanan dunia yang menguntungkan mengacu pada kondisi internasional yang sesuai dengan kepentingan negara besar untuk memperkuat posisinya dalam sistem internasional. Berdasarkan teori *offensive realism* dari Mearsheimer memberikan pandangan bahwa negara besar akan selalu berusaha mencegah munculnya kekuatan lain sebagai pesaing, terutama dikawasan strategis yang mempunyai potensi membangun hegemoni pengaruh budaya luar.⁴⁵ Oleh karena itu, mewujudkan tata dunia yang menguntungkan bukan sekedar idealisme, tetapi strategi untuk mempertimbangkan agar dominasi tetap bertahan di wilayah yang diharapkan.

Peace Corps menjadi instrumen penting dalam menopang tata dunia yang menguntungkan bagi negara Amerika Serikat. Peace Corps yang programnya fokus pada bidang pendidikan dan sosial juga memiliki sisi dimensi strategi untuk memperkuat legitimasi negara Amerika Serikat di mata masyarakat internasional, memperdalam hubungan kelembagaan, dan menciptakan hubungan sosial dan politik yang akan mendukung kepentingan globalnya.⁴⁶ Melihat negara Indonesia yang memiliki posisi strategis seperti negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, anggota penting G20, serta berada di wilayah strategis Asia Tenggara. Melalui beberapa poin strategis dari negara Indonesia tersebut, menjadikan negara ini sebagai wilayah perebutan pengaruh antara negara-negara besar

⁴⁵ John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, hlm. 29-31

⁴⁶ Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, hlm. 45-47

terutama negara Amerika Serikat dan Tiongkok.⁴⁷

Peace Corps Indonesia melaksanakan programnya dengan menjalin kerja sama bersama lebih dari 14 lembaga pemerintah termasuk didalamnya kementerian agama, kementerian pendidikan, kementerian luar negeri, imigrasi hingga kepolisian.⁴⁸ Jangkauan yang lebih luas ini memperlihatkan bahwa Peace Corps tidak hanya sekedar muncul di ruang pendidikan, tetapi telah memperoleh legitimasi kelembagaan yang kuat di negara mitra. Berdasarkan konteks kawasan Asia Tenggara, Peace Corps juga memiliki peran strategis untuk menahan pengaruh ekspansi dari Tiongkok.⁴⁹

Sejalan dengan pemikiran dari Mearsheimer, strategi ini merupakan bentuk hegemoni preventif yaitu negara besar tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga menciptakan situasi sosial dan politik yang memperkuat upaya untuk mendapatkan dukungan.⁵⁰ Peace Corps membantu Amerika Serikat menutup ruang bagi pengaruh budaya ideologi alternatif, baik komunisme di masa yang telah berlalu maupun otoritarianisme Tiongkok di masa sekarang. Dengan demikian, kepentingan tata dunia Amerika Serikat melalui Peace Corps yaitu untuk memerangi dominasi kekuatan saingan, mengacu pada masyarakat lokal dengan struktur global berbasis nilai pendidikan bahasa inggris, serta menciptakan legitimasi kelembagaan melalui kerja sama dengan

kementerian dan instansi lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, Peace Corps selain sebagai lembaga yang fokus di program pendidikan juga sebagai instrumen non-militer untuk menopang tatanan dunia yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan hegemoni Amerika Serikat.

Selain menghadapi isu Radikalisme, Amerika Serikat juga memanfaatkan Peace Corps sebagai sarana memperkuat kapitalisme global. Melalui pengajaran bahasa Inggris yang dasarnya tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi internasional, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam sistem ekonomi kapitalis global.⁵¹ Bahasa inggris yang sering disebut sebagai *lingua franca globalisasi* merupakan instrumen strategis untuk memperluas penetrasi pasar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam struktur ekonomi dunia. Peace Corps tidak hanya memfasilitasi pembangunan lokal, tetapi secara halus menyiapkan masyarakat di negara-negara mitra agar lebih kompatibel dengan sistem kapitalisme internasional. Berdasarkan sudut pandang *offensive realism*, hal ini sejalan dengan hegemoni kepentingan Amerika Serikat untuk menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung kedudukannya sebagai negara yang unggul.⁵²

Peace Corps mencerminkan strategi Amerika Serikat sebagai upaya untuk menciptakan tatanan dunia yang menguntungkan atau tatanan dunia yang sesuai dengan kepentingan hegemoninya. Mearsheimer menekankan bahwa negara

⁴⁷ Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World* (New York: Holt Paperbacks, 2008), hlm. 122.

⁴⁸ Peace Corps Indonesia, *Annual Report 2021*

⁴⁹ David Shambaugh, *Where Great Powers Meet: America and China in Southeast Asia* (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 87–89

⁵⁰ Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, hlm. 55–57

⁵¹ Philip G. Altbach, "Globalization and the University: Myths and Realities in an Unequal World," *Tertiary Education and Management* Vol. 1, No. 1 (1995), hlm. 7–8.

⁵² Samuel Huntington, *Who Are We? The Challenges to America's National Identity* (New York: Simon & Schuster, 2004), hlm. 212–215.

besar akan selalu mencari cara untuk menghalangi munculnya peluang bagi kekuatan saingan di kawasan yang strategis. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan juga memiliki posisi penting dalam tatanan regional Asia Tenggara. Peace Corps Indonesia bekerjasama dan diawasi langsung lebih dari 14 lembaga pemerintah Indonesia, termasuk didalamnya kementerian pendidikan, kementerian agama, kepolisian, imigrasi dan lainnya.⁵³ Upaya ini menunjukkan bagaimana Amerika Serikat membangun legitimasi kelembagaan sekaligus memperluas jangkauannya. Melalui cara ini Amerika Serikat dapat menutup ruang atau peluang bagi kekuatan lain yang muncul untuk mendominasi di negara Indonesia.

KESIMPULAN

Peace Corps dapat dilihat sebagai sebuah instrumen non-militer yang digunakan oleh negara Amerika Serikat untuk menanamkan nilai-nilai, memperkuat jaringan sosial dan politik, menekan isu radikalisme, serta membentuk lingkungan budaya yang lebih terbuka terhadap pengaruh demokrasi liberal Amerika Serikat. Dengan pengiriman volunteer untuk mengabdikan dan terlibat langsung di lingkungan masyarakat Indonesia, Amerika Serikat berupaya membangun legitimasi sosial yang mendukung tujuan hegemoninya. Melalui misi pendidikan dan sosial yang terlihat secara langsung menyelipkan tujuan dari agenda strategis jangka panjang yaitu menyebarkan pengaruh ideologinya secara perlahan dan mencegah munculnya peluang bagi kekuatan dari saingan seperti Tiongkok, serta membuka peluang untuk sistem ekonomi kapitalisme di negara mitranya.

⁵³ Ananda Roman, Program Manager Peace Corps Indonesia Pada 05 Mei 2025

Berdasarkan konsep kepentingan dari Donald E Nuechterlain, Peace Corps mengandung dua konsep kepentingan yang juga ingin dicapai oleh Amerika Serikat yaitu kepentingan ideologis untuk menyebarkan nilai-nilai keterbukaan, individualism, demokrasi liberal dan menekan isu radikalisme secara tidak langsung. Kemudian, kepentingan tata dunia yaitu dengan keberadaan Peace Corps di Indonesia memberi kontribusi bagi upaya Amerika Serikat menciptakan tatanan kawasan yang menguntungkan dengan cara memperkuat kedudukan dengan pendekatan sosial dan politik tanpa harus mengerahkan kekuatan militer ataupun strategi yang besar, serta memperkuat kapitalisme global.

Memahami dari sisi negara Indonesia, program Peace Corps yang ada di kawasan prioritas di Indonesia memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan bahasa Inggris, dan Pembangunan komunitas lokal. akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang *Realism Offensive* kerja sama ini tidak sepenuhnya mutualistik, melainkan penuh dengan perhitungan strategi dari negara Amerika Serikat untuk menjaga dan memperkuat pengaruhnya di kawasan strategis. Dengan demikian, Peace Corps dapat dipahami sebagai instrumen *offensive* non-militer yang menampilkan bagaimana Amerika Serikat menggunakan jalur ini untuk mendukung kepentingan nasionalnya dan memperluas kembali jaringan globalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Altbach G. Philip, "Globalization and the University: Myths and Realities in an Unequal World," *Tertiary Education and Management* Vol. 1, No. 1 (1995), hlm. 7–8.
- Ashari Khasan. (2015). "Kamus Hubungan Internasional". Bandung: Nuansa

- Cendekia. hlm 308.
- Awani Irewati., et.al. (2005). Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menyikapi Masalah Terorisme Pasca 91. Jakarta: Pusat Penelitian Politik. Hlm 47.
- Fukuyama Francis.(1992). *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press. hlm. 45–47.
- Hoffman Bruce. (2006). *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press. hlm. 282–285.
- Hefner W. Robert. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press. hlm. 12–14.
- Huntington Samuel. (2004). *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*. New York: Simon & Schuster. hlm. 212–215.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2020). Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia, Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar. Diakses Pada 17 November 2024 dari <https://kemenag.go.id>.
- Kementrian Luar negeri Republik Indonesia. (2024). Sejarah Hubungan Republik Indonesia dan Amerika Serikat pada 12 Mei 2025 diakses dari <https://kemlu.go.id>.
- Larry Diamond. (2008). *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. New York: Holt Paperbacks. hlm. 122.
- Mas' oed Mohtar. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. Hlm 139.
- Memorandum of Understanding Peace Corps* Indonesia tahun 2021.
- Memorandum of Understanding Peace Corps* Indonesia tahun 2009
- Mearsheimer John. (2001). *The Tragedy og Great Power Politics*. New York: W.W.Norton Company&Company. hlm 21-22.
- Nuechterlain E. Donald. (1979). *National Interest: A New Approach*. Orbis. Vol.23. No.1 (Spring). Hlm 57.
- Nye S. Joseph. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, hlm. 31–33.
- O'Rourke, R., *U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress*. Congressional Research Service, 4, 2021.
- Peace Corps, *Execution of Volunteers Worldwide*, 2020, diakses Pada 12 mei 2025 dari <https://www.peacecorps.gov/news/library/peace-corps-evacuates-volunteers/>
- Peace Corps, *History, core Expectations, project framework, intro to PST*, Peace Corps Indonesia, 2018
- U.S. Department of State. (2025, Juni 20) *Foreign Relations of the United States 1961-1963*, United States diakses pada dari <https://history.state.gov>
- Peace Corps Indonesia. (2022). *Annual Report Tahun 2022*, Washington D.C.: Peace Corps,
- Peace Corps Indonesia, Annual Report: Laporan Tahunan 2020.
- Peace Corps, *Annual Performance Report*, 2016 diakses pada 15 Mei 2025 dari <https://www.peacecorps.gov>
- Peace Corps Indonesia. (2025, November 12). 2025 Annual Report: Laporan Tahunan 2021.Surabaya: Peace Corps Indonesia, diakses pada dari <https://www.peacecorps.gov>.
- Roman Ananda. (2025). Program Manager Peace Corps Indonesia Pada 05 Mei 2025.
- Shambaugh David. (2020). *Where Great Powers Meet: America and China in Southeast Asia*. New York: Oxford University Press. hlm. 87–89.
- Tri Saptono Yulian dkk. (2023).“Kerjasama

Indonesia dan Amerika Serikat Mendukung Peran Indonesia sebagai *Leading Sector* dalam Pembentukan ASEAN Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force”. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No.1, 2023, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/viewFile/1116/608>.

Triwahyuni Dewi. (2024, November 19) Perubahan Kebijakan keamanan Amerika Serikat Pasca 11 September 2001 untuk Kawasan Asia Tenggara diakses dari <https://repository.unikom.ac.id/30659/1/bu-dewi-triwahyuni.pdf>.

Weinstein B. Franklin. (1976). *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*. New York: Cornell University Press. hlm 165.